

ABSTRAK

Nama : Putri Patricia Bernard
Program Studi : Hukum Bisnis
Judul : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melanggar Impor Telepon Genggam Secara Tidak Resmi**

Dewasa ini, kebutuhan masyarakat akan barang semakin meningkat khususnya dengan kemajuan teknologi. Pasar gelap sangat erat kaitannya dengan penyelundupan ilegal seperti telepon genggam. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengaturan hukum terhadap impor telepon genggam tidak resmi (black market) menurut hukum di Indonesia Dan Bagaimana penegakan hukum terhadap impor telepon genggam tidak resmi oleh pelaku yang dijual kepada konsumen menurut hukum di Indonesia. dengan metodologi penelitian metode yang akan digunakan metode kualitatif, berfokus pada desain eksploratif-kualitatif dan Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan studi Pustaka. Hasil penelitiannya adalah Pengaturan mengenai ekspor impor dalam hal ini telepon genggam terdapat didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Permendag Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity*; dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemudian Penegakan hukum terdapat didalam Pasal 113 Undang-Undang Perdagangan, Kemudian Pasal 102 dan 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Pasal 480 KUHP mengenai penadahan. Selain itu didalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Permendag Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity*

Kata Kunci : *Penyeludupan, Telepon Genggam, Penegakan Hukum*

ABSTRACT

Name : *Putri Patricia Bernard*

Study Program : *Bussiness Law*

Title : *Law Enforcement Against Businesses That Violate The Unauthorized Importation of Mobile Phones*

Nowadays, people's need for goods is increasing, especially with technological advances. The black market is closely related to illegal smuggling such as mobile phones. The formulation of the problem is How is the legal regulation of the import of unofficial mobile phones (black market) according to the law in Indonesia and How to enforce the law against the import of unofficial mobile phones by actors sold to consumers according to the law in Indonesia. with the method research methodology that will be used qualitative method, focusing on exploratory-qualitative design and Data collection is carried out by observation and literature study. The results of his research are regulations regarding import exports, in this case mobile phones contained in Law Number 7 of 2014 concerning Trade, Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 29 of 2019 concerning the Identity Database System of Mobile Telecommunication Devices, Regulation of the Minister of Trade concerning Amendments to Permendag Number 38 of 2019 concerning Provisions for Instructions for Use and Guarantee of After-Sales Services for Electronic Products and Telematics Products, Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 1 of 2020 concerning Control of Telecommunication Devices and / or Devices Connected to Cellular Mobile Networks Through Identification of International Mobile Equipment Identity; and the Criminal Code then Law Enforcement is contained in Article 113 of the Trade Law, then Articles 102 and 102B of Law Number 17 of 2006 concerning Customs and Article 480 of the Criminal Code concerning retention. In addition, in the Regulation of the Minister of Industry Number 29 of 2019 concerning the Identity Database System of Mobile Telecommunications Devices, regulation of the Minister of Trade concerning Amendments to permendag Number 38 of 2019 concerning Provisions for Instructions for Use and Guarantee of After-sales Services for Electronic Products and Telematics Products and Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 1 of 2020 concerning Control of Telecommunications Equipment and / or Devices Connected to Mobile Networks Mobile Through International Mobile Equipment Identity Identification

Keywords : *Smuggling, Mobile Phones, Law Enforcement*